



Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Individu Berdasarkan Perpres 82/2016



Dialog Rektor dengan DPRD Kota Depok
Swissbel Residence Kalibata-Jakarta, 8 Mei 2018

**PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN
ALTERNATIF DALAM PENCEPATAN TERCAPAINYA
GENDER SERTA ANALISASI FUNGSI DPRD SEBAGAI R
DENGAN MENDORONG PENCEPATAN PEREKONOMIAN DAN I**

Belresidence Kalibata - Jakarta, 7 - 9 Mei 2018



**Dialog Rektor dengan DPRD Kota Depok
Swissbel Residence Kalibata-Jakarta, 8 Mei 2018**



Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran dan MA in Economics dari University of Colorado at Denver, USA ini adalah Rektor Universitas Darma Persada (Unsada) Jakarta.

Selama 30 tahun berkarir di Bappenas sejak awal 1988, Dadang Solihin pernah menjadi Direktur selama 7 tahun lebih. Sarjana Ekonomi Pembangunan FE Unpar ini sudah menghasilkan beberapa buku tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan, dll

Dadang Solihin adalah peserta terbaik Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXIX tahun 2010 Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Jakarta dan peserta terbaik Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) XLIX tahun 2013 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Ia dinyatakan lulus Dengan Pujian serta dianugerahi Penghargaan *Wibawa Seroja Nugraha*.

Sejak 2015 ia dipercaya menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI), dan sejak 2016 ia menduduki posisi sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Karya-karyanya tersebar di berbagai media terutama di media on-line. Silahkan email dadangsol@gmail.com, HP 0812-9322-202, web <http://dadang-solihin.blogspot.co.id>



Materi

- Perpres 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Sektor
- Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
- Kemiskinan di Indonesia
- Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional
- Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan



Perpres 82/2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Keuangan Inklusif

- **Keuangan Inklusif** adalah kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Layanan keuangan yang disediakan harus dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mudah untuk diakses dari sisi persyaratan serta layanan.
- Layanan keuangan yang aman dimaksudkan agar masyarakat terlindungi hak dan kewajibannya dari risiko yang mungkin timbul.

Visi dan Misi Keuangan Inklusif

- **Visi:**

Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Misi:**

- a. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
- b. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
- d. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
- e. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Pendekatan Keuangan Inklusif

- a. Kombinasi dari empat konsep utama yang saling menguatkan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah.
- b. Identifikasi penyelesaian permasalahan yang menghambat perluasan akses kepada semua lapisan masyarakat terhadap layanan keuangan dan peluang kegiatan ekonomi produktif dengan mempertimbangkan *best practices* dan *lesson learned* dari domestik dan internasional.
- c. Upaya yang selaras dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Prinsip Keuangan Inklusif

- a. **Kepemimpinan (*Leadership*)**: Menumbuhkan komitmen pemerintah dan otoritas keuangan terhadap peningkatan keuangan inklusif.
- b. **Keragaman (*Diversity*)**: Mendorong ketersediaan berbagai layanan keuangan oleh penyedia layanan keuangan yang beragam.
- c. **Inovasi (*Innovation*)**: Mendorong inovasi teknologi dan kelembagaan sebagai sarana untuk memperluas akses dan penggunaan sistem keuangan.
- d. **Perlindungan (*Protection*)**: Mendorong pendekatan yang komprehensif bagi perlindungan konsumen yang melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.
- e. **Pemberdayaan (*Empowerment*)**: Mengembangkan literasi keuangan dan kemampuan keuangan masyarakat.
- f. **Kerja sama (*Cooperation*)**: Memperkuat koordinasi dan mendorong kemitraan antara seluruh pemangku kepentingan pada sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Prinsip Keuangan Inklusif

- g. **Pengetahuan (*Knowledge*)**: Menggunakan data dan informasi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan, serta pengukuran keberhasilan yang dilaksanakan oleh regulator dan penyedia layanan keuangan.
- h. **Proporsionalitas (*Proportionality*)**: Membentuk kerangka kebijakan dan peraturan yang secara proporsional mempertimbangkan aspek risiko dan manfaat dari inovasi produk dan jasa keuangan.
- i. **Kerangka kerja (*Framework*)**: Mempertimbangkan kerangka kerja peraturan yang mencerminkan standar internasional, kondisi nasional, dan dukungan bagi sistem keuangan yang kompetitif.

Sasaran Masyarakat

- Keuangan inklusif menekankan penyediaan layanan keuangan berdasarkan kebutuhan yang berbeda dari tiap kelompok masyarakat.
- Meskipun mencakup semua segmen masyarakat, kegiatan keuangan inklusif difokuskan pada kelompok yang belum terpenuhi oleh layanan keuangan formal yaitu masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok.
- Masyarakat berpendapatan rendah adalah kelompok masyarakat 40% berpendapatan terendah berdasarkan Basis Data Terpadu yang bersumber dari hasil kegiatan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
- Kelompok ini memiliki akses terbatas atau tanpa akses sama sekali ke semua jenis layanan keuangan yang mencakup masyarakat penerima bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat, dan wirausaha yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk memperluas usaha.
- Sementara itu, pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sasaran

Masyarakat Lintas Kelompok

1. **Pekerja Migran**

Kelompok ini memiliki akses yang terbatas ke layanan keuangan formal untuk mendukung selama proses tahapan migrasi (pra, selama, dan pasca migrasi).

2. **Wanita**

Berdasarkan data Global Findex 2014, hanya 37,5% wanita Indonesia yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal.

3. **Kelompok masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**

Kelompok ini antara lain terdiri dari anak terlantar, penyandang disabilitas berat, lanjut usia, mantan narapidana, dan mantan tunasusila.

4. **Masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar**

Masyarakat ini tinggal di wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional ditinjau dari kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, prasarana infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

5. **Kelompok Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda**

Jumlah kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda diperkirakan mencapai 106,8 juta orang atau 41,87% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015.

Akses kepada Produk Layanan Keuangan

1. Akses kepada Instrumen Transaksi Pembayaran

Akses keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah dapat dimulai dari penggunaan uang elektronik untuk mempermudah transaksi pembayaran dan mulai belajar mengelola keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya berkembang kebutuhan untuk menabung pada tabungan di bank, serta kebutuhan yang lebih luas untuk produk dan layanan keuangan lainnya.

2. Akses kepada Tabungan

Sesuai data Global Findex 2014, sekitar 69,3% penduduk dewasa di Indonesia terlayani jasa simpanan dan memiliki tabungan dalam berbagai bentuk. Namun, hanya sekitar 26,6% yang memiliki rekening tabungan pada lembaga keuangan formal. Sisanya memiliki tabungan dalam skema informal, seperti tabungan dalam kelompok menabung atau dititipkan kepada orang lain di luar keluarga.

Dari 69,3% penduduk yang menabung:

- 33,3% menabung untuk pendidikan atau biaya sekolah,
- 27,1% menabung untuk hari tua, dan
- 22,6% menabung untuk pertanian atau usaha.

Akses kepada Produk Layanan Keuangan

3. Akses kepada Kredit/Pembiayaan

Penggunaan kredit atau pembiayaan dari sektor formal lebih rendah dibandingkan dengan tabungan dan didominasi oleh sumber informal, seperti teman, keluarga, tetangga, majikan, hingga 'rentenir'. Sebanyak 56,6% penduduk dewasa di Indonesia memiliki akses ke kredit dari berbagai sumber, namun kredit dari lembaga keuangan formal hanya menjangkau 13,1% penduduk. Sisanya sekitar 43,4% penduduk bahkan belum menerima kredit.

4. Akses kepada Asuransi

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Tahun 2013 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diketahui bahwa indeks literasi masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian relatif masih rendah yaitu 17,84%. Hal ini berarti dari setiap 100 orang penduduk Indonesia, hanya terdapat 18 orang yang memahami tentang asuransi.

Rendahnya indeks Literasi Perasuransian menyebabkan masih kurangnya pemanfaatan produk dan jasa perasuransian oleh masyarakat yang saat ini hanya mencapai 11,81%. Hal ini berarti dari setiap 100 penduduk Indonesia, hanya terdapat 12 orang yang memanfaatkan produk dan jasa asuransi.

Akses kepada Produk Layanan Keuangan

5. Akses kepada Layanan Remitansi

Remitansi adalah salah satu bagian penting dari ekonomi, terutama di negara berkembang. Sekitar 17,9% dan 31% penduduk dewasa di Indonesia pernah mengirimkan dan menerima remitansi. Dari persentase tersebut, sebagian besar pengiriman dan penerimaan remitansi dilakukan melalui lembaga keuangan, masing-masing sebesar 52,4% dan 36,3%. Sisanya melaksanakan remitansi melalui operator pengiriman uang dan telepon seluler.

Berdasarkan data World Bank 2014, pengiriman remitansi tahunan secara keseluruhan diperkirakan mencapai US\$ 8,400,000,000.00 (delapan miliar empat ratus juta dollar Amerika Serikat) dan angka ini berada di bawah negara ASEAN lain seperti Filipina dan Vietnam.

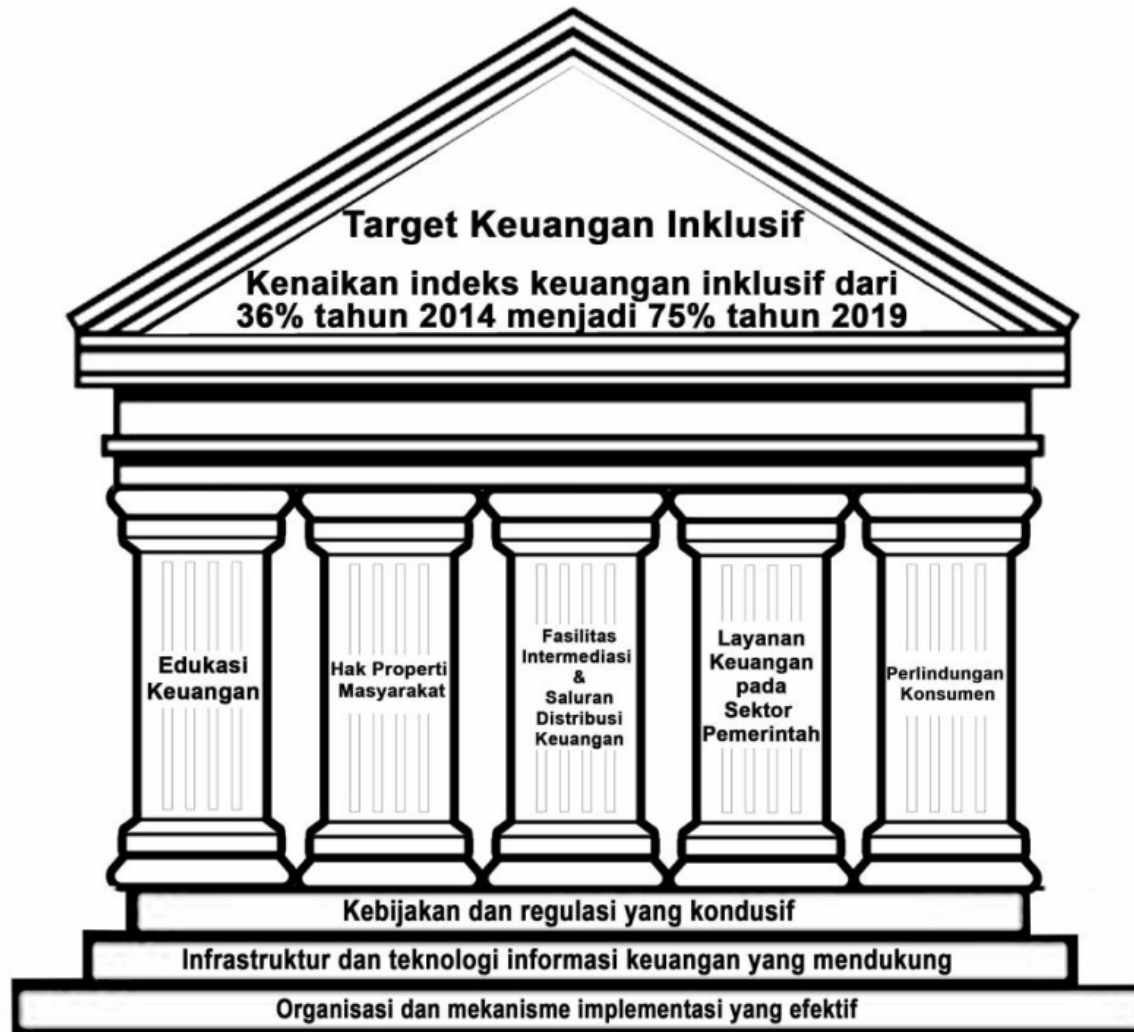
Lembaga Keuangan

- Sistem keuangan yang berfungsi baik merupakan prasyarat mendasar dalam proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pasar dan lembaga keuangan memegang peran penting dalam menyalurkan dana untuk penggunaan yang paling produktif serta mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya.
- Dengan demikian dapat membantu memitigasi pengaruh informasi asimetris dan meringankan biaya transaksi guna memacu pertumbuhan ekonomi, serta mendorong persamaan kesempatan, distribusi pendapatan dan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- Lembaga keuangan formal yang telah berkembang di Indonesia adalah Bank, Industri Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang memiliki prinsip konvensional dan syariah.

Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran

- Lembaga penyedia jasa pembayaran di Indonesia saat ini terdiri dari bank dan non bank penyelenggara Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI – RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, jaringan (prinsipal) kartu ATM/kartu debit, penyelenggara jaringan (prinsipal) Kartu Kredit, penerbit uang elektronik, dan penyelenggara transfer dana yang juga merupakan penyedia layanan remitansi.
- Berbagai penyelenggara ini perlu pula didorong untuk berkontribusi menyediakan layanan sistem pembayaran untuk tujuan memperluas akses masyarakat kepada layanan keuangan.
- Berdasarkan potensi jangkauan layanan, lembaga selain bank yang dapat berperan memperluas akses keuangan adalah penerbit uang elektronik seperti perusahaan telekomunikasi.

Pilar dan Fondasi SNKI



Pilar

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

1. Pilar Edukasi Keuangan

Bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai lembaga keuangan formal, produk dan jasa keuangan termasuk fitur, manfaat dan risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

2. Pilar Hak Properti Masyarakat

Bertujuan untuk meningkatkan akses kredit masyarakat kepada lembaga keuangan formal.

3. Pilar Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi Keuangan

Bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Pilar

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

4. Pilar Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah

Bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan transparansi pelayanan publik dalam penyaluran dana Pemerintah secara nontunai.

5. Pilar Perlindungan Konsumen

Bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinteraksi dengan lembaga keuangan, serta memiliki prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, penanganan pengaduan, serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Fondasi

Strategi Nasional Keuangan Inklusif

1. Kebijakan dan regulasi yang kondusif

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan dan regulasi dari Pemerintah dan otoritas/regulator.

2. Infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung

Fondasi ini diperlukan untuk meminimalkan informasi asimetris yang menjadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan.

3. Organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif

Keberagaman pelaku keuangan inklusif memerlukan organisasi dan mekanisme yang mampu mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia berdasarkan Sektor

Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDB (%)			
	2015	2016	APBNP 2017	Proyeksi 2018
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,8	3,3	3,4	3,6
2. Pertambangan dan Penggalian	-3,4	1,1	1,3	1,4
3. Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,8	4,9
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0,9	5,4	5,0	5,4
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,1	3,6	4,0	5,4
6. Konstruksi	6,4	5,2	6,5	6,7
7. Perdagangan Besar dan Eceran	2,6	3,9	5,1	5,5
8. Transportasi dan Pergudangan	6,7	7,7	8,1	8,3
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,3	4,9	5,2	5,4
10. Informasi dan Komunikasi	9,7	8,9	10,1	10,5
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,6	8,9	9,9	10,1
12. Real Estat	4,1	4,3	4,8	5,4
13. Jasa Perusahaan	7,7	7,4	7,4	7,6
14. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,6	3,2	3,5	4,0
15. Jasa Pendidikan	7,3	3,8	4,1	4,3
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,7	5,0	5,5	5,7
17. Jasa lainnya	8,1	7,8	8,1	8,2
Total PDB	4,9	5,0	5,2	5,4

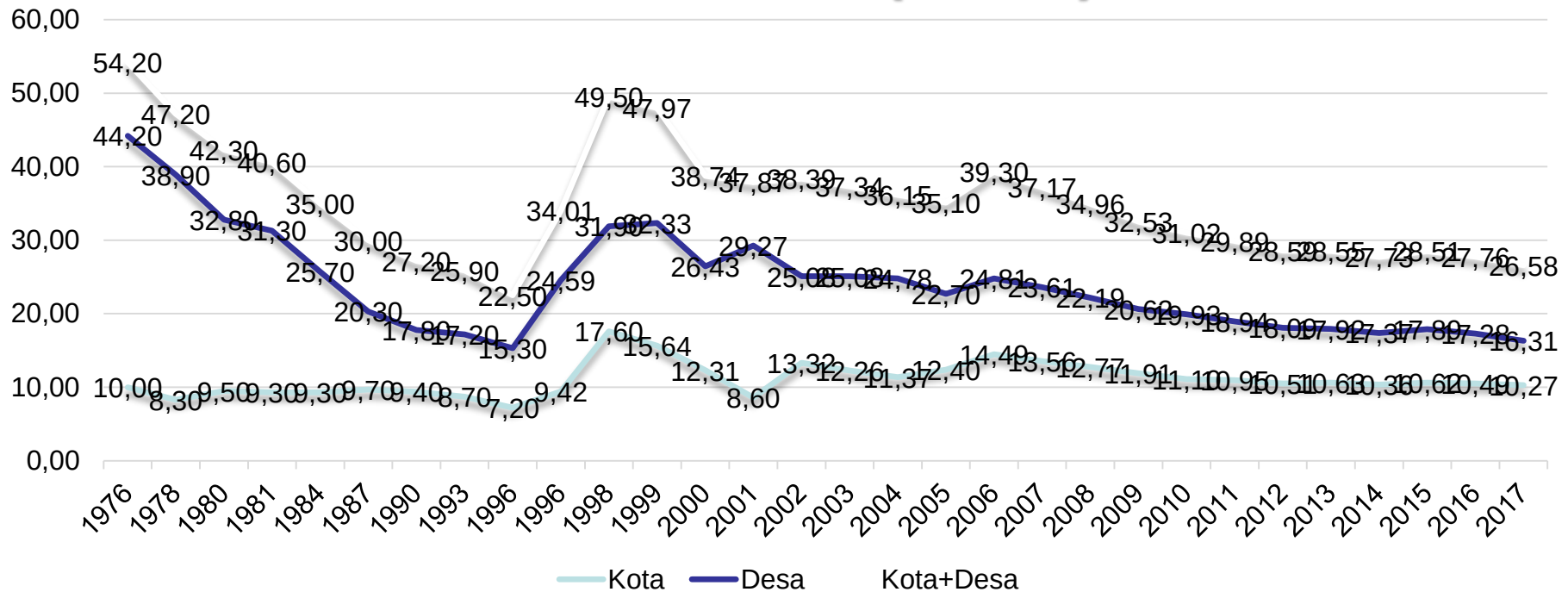
Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

1. Sektor pertanian ditingkatkan melalui program modernisasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian
2. Pendalaman industri berbasis sumber daya alam dengan hilirisasi
3. Mendorong investasi di sektor pertambangan, khususnya di bidang energi
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi terus dilakukan
5. Produktivitas sektor jasa dijaga dan ditingkatkan, melalui:
 - a) Sektor konstruksi, transportasi, informasi-komunikasi untuk mendukung efisiensi sistem logistik nasional
 - b) Mendorong perkembangan sektor jasa keuangan melalui kebijakan *financial deepening & financial inclusion*

Kemiskinan di Indonesia

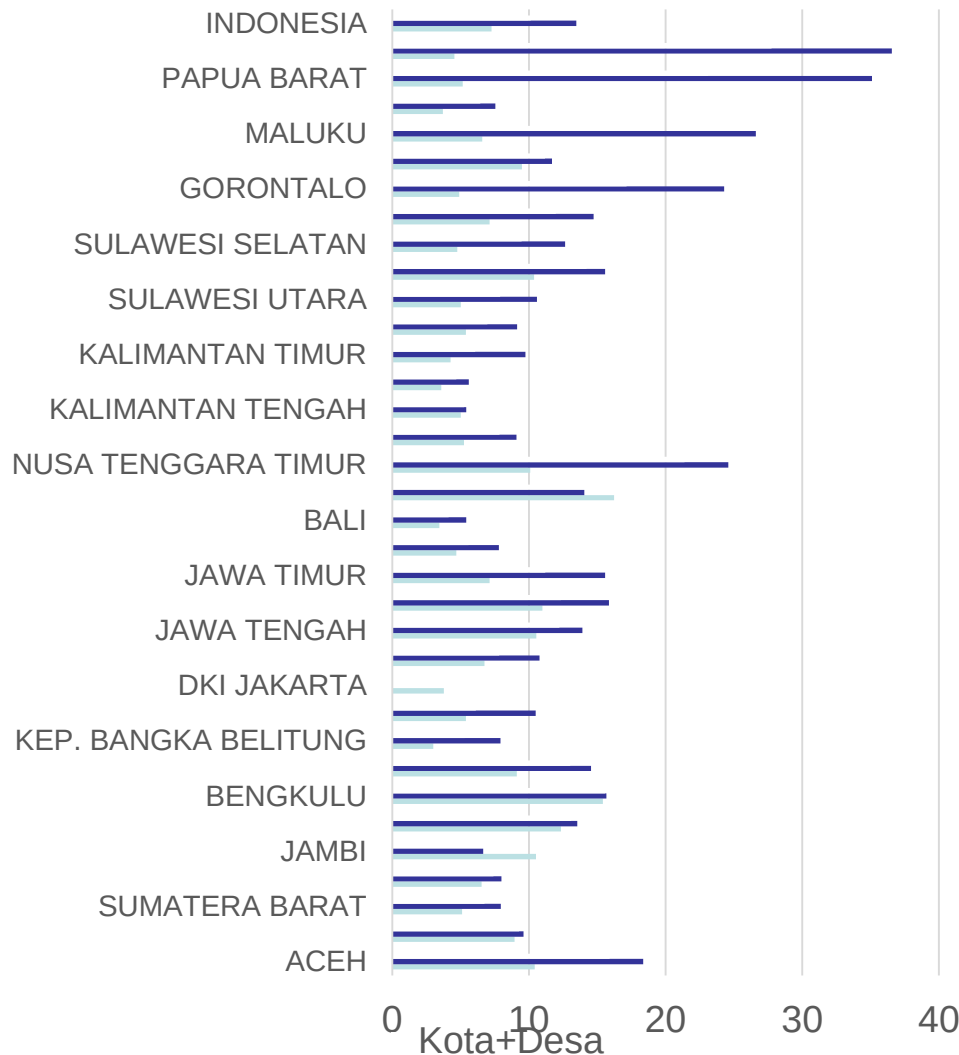


Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1970-2017 (Juta)



- Penurunan jumlah penduduk miskin per tahun mengalami perlambatan dibandingkan masa sebelum krisis,
- Terdapat lebih banyak penduduk miskin di wilayah pedesaan dibandingkan di perkotaan.

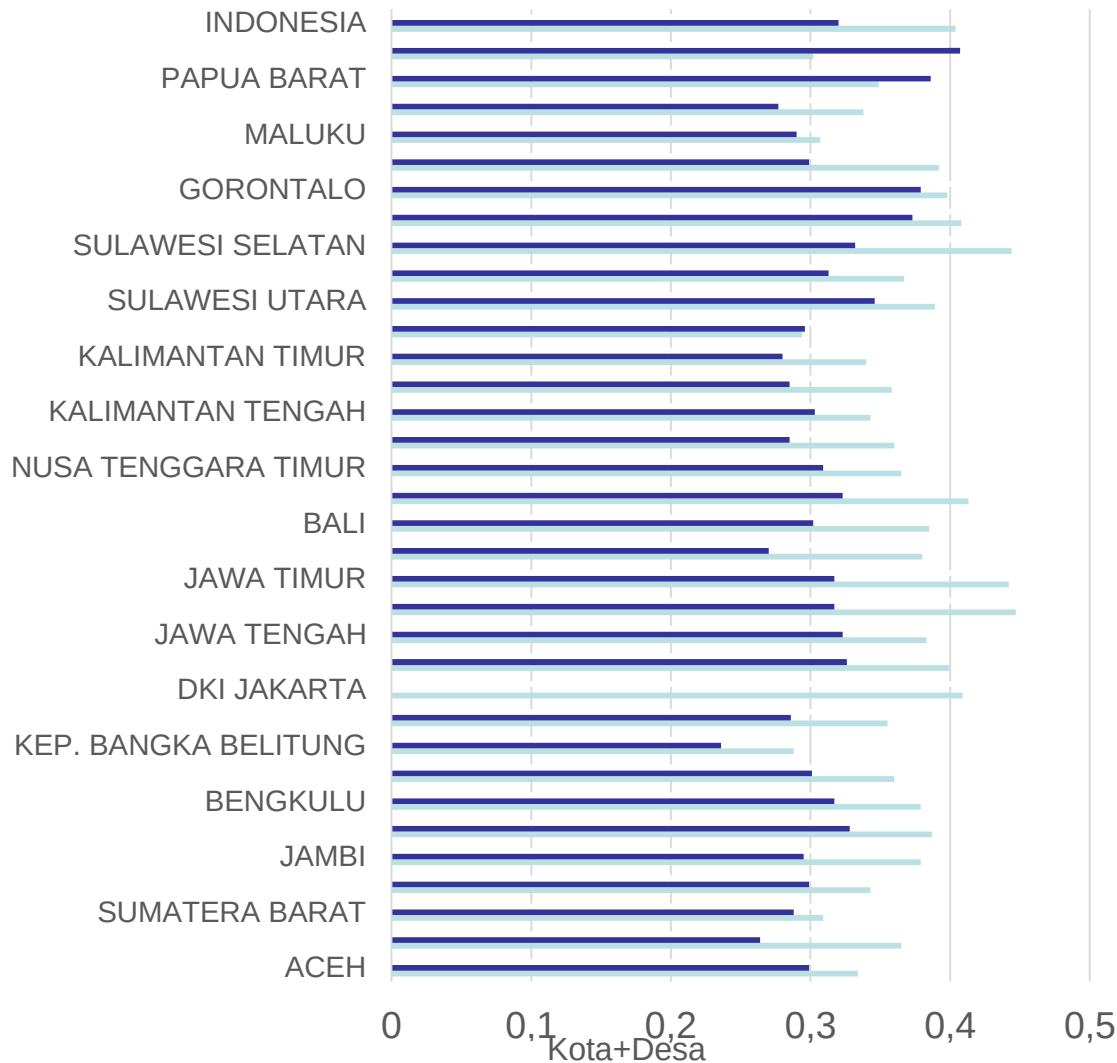
Persentase Kemiskinan Provinsi 2017



Persentase kemiskinan di Wilayah Indonesia Timur lebih tinggi daripada persentase kemiskinan di Wilayah Indonesia barat.

Persentase kemiskinan pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan di seluruh provinsi

Gini Rasio Provinsi 2017



Wilayah pedesaan yang penduduknya relatif memiliki kesejahteraan yang sama akan cenderung lebih mudah diajak bergotong royong atas dasar kesamaan nasib,

Namun demikian, data rasio gini menunjukkan ketimpangan di wilayah perkotaan lebih tinggi daripada di wilayah pedesaan.

Sasaran Pembangunan Nasional

Target Pembangunan	2016	2017	2018
Tingkat Kemiskinan	10,7	10,4	9,5-10,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61	5,4	5,0-5,3
Gini Rasio	0,397	0,39	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,18	70,79	71,5

0899 7759 337

Program Penanggulangan Kemiskinan

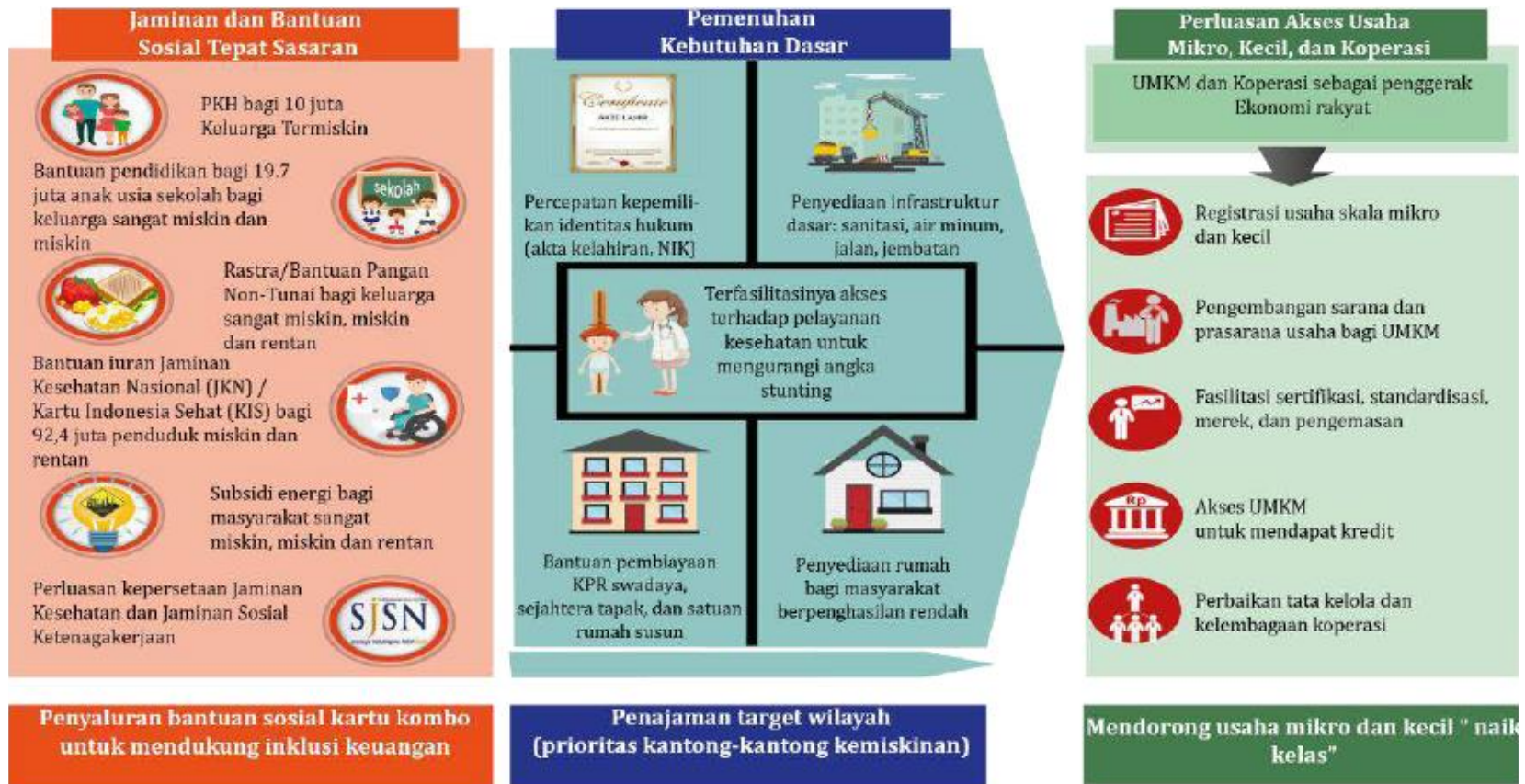
Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Program	Dana (Triliun Rupiah)		Sasaran
Subsidi	145,5	117.700	Kepala Keluarga
Dana Desa	60,0	74.958	Desa
JKN	25,5	92.400.000	Jiwa
Bantuan Pangan	20,8	15.600.000	Keluarga Penerima Manfaat
PKH	17,1	10.000.000	Keluarga Penerima Manfaat
Indonesia Pintar	10,8	19.600.000	Siswa
Bidik Misi	4,1	401.700	Mahasiswa
Total	283,8		

Presiden mengarahkan agar APBN 2018 fokus pada Penanggulangan Kemiskinan

Namun demikian, peran daerah diperlukan untuk mengisi gap yang ditinggalkan pemerintah pusat agar penanggulangan kemiskinan dapat dipercepat

Program Penanggulangan Kemiskinan Nasional



- Program penanggulangan kemiskinan yang ada masih didominasi oleh program konsumsi
- Penanggulangan kemiskinan pada sisi produksi perlu didorong dengan memberikan motivasi insentif yang lebih besar ketika berhasil naik kelas daripada bantuan yang diberikan



Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan

BALAI KOTA DEPOK

Permasalahan Kemiskinan di Indonesia



Tiga karakteristik kemiskinan yang menonjol saat ini

1. Jumlah Penduduk miskin masih cukup besar
2. Ketimpangan kemiskinan antar wilayah
3. Akses & kualitas pelayanan dasar penduduk miskin masih jauh tertinggal.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan Natural

- Kemiskinan natural adalah kemiskinan karena dari asalnya memang miskin.
- Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya,
- sehingga mereka tidak dapat ikut secara aktif dalam pembangunan atau kalaupun ikut serta dalam pembangunan mereka mendapatkan imbalan pendapatan yang amat rendah.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan Struktural

- Kemiskinan struktural adalah kemiskinan (baik kemiskinan absolut maupun relatif) yang disebabkan oleh perbedaan struktur masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan masih tertinggal.
- Kemiskinan struktural ini dikenal juga dengan kemiskinan yang disebabkan hasil pembangunan yang belum seimbang.

Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan Kultural

- Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya, mereka sudah merasa kekurangan.
- Kelompok masyarakat ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mudah melakukan perubahan, menolak mengikuti perkembangan, dan tidak mau berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai.

Hak Masyarakat Miskin

Memperoleh
kecukupan pangan,
sandang, dan
perumahan

Memperoleh
pelayanan kesehatan;

Memperoleh
pendidikan yang
dapat meningkatkan
martabatnya;

Mendapatkan
perlindungan sosial
memperoleh derajat
kehidupan yang layak;

Memperoleh
lingkungan hidup
yang sehat;

Meningkatkan kondisi
kesejahteraan yang
berkesinambungan;
dan

Memperoleh
pekerjaan dan
kesempatan
berusaha.

Determinan Kemiskinan di Daerah

- Transfer dari pusat mendominasi sumber pendapatan daerah
- Pemerintah daerah mampu menghasilkan pendapatannya sendiri
 - Bukti berupa kerugian/kerusakan bagi iklim investasi dengan adanya regulasi yang kompleks dan problematis yang sering kali tumpang tindih dengan regulasi nasional
 - Keberadaan sumber daya alam merupakan determinan kunci tentang jumlah pendapatan yang dapat dihasilkan oleh daerah
- Kapasitas Teknis
 - Sekitar dua pertiga desa di Indonesia, khususnya di kawasan timur, masih tidak memiliki akses ke jaringan telekomunikasi
 - Belanja pemerintah daerah lebih banyak dilakukan untuk gaji pegawai daripada untuk layanan
- Aspek Tata Kelola Desentralisasi
 - Pengaturan kewenangan pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah
 - Sehausnya desentralisasi tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi

Sumber:

Nazara (2014) Peran Penting Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan
dadang-solihin.blogspot.co.id

Peran Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan



bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program diantara lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat

Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga

- bantuan pangan dan sandang;
- bantuan kesehatan;
- bantuan pendidikan; dan
- bantuan perumahan.

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;

- pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
- bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
- fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
- fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
- fasilitasi kemitraan Pemerintah dan Swasta

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;

- peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
- perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
- peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
- peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Program-program lainnya

- program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
- program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
- program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Penanggulangan kemiskinan di level daerah perlu difokuskan untuk mengisi gap yang belum ditangani oleh pemerintah pusat seperti peningkatan akurasi sasaran, merangkul stakeholder yang lebih luas, peningkatan keberlanjutan program, dan perluasan skala program

Penajaman Sasaran Program



- Posisi pemerintah pusat yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat menyebabkan risiko kesalahan sasaran program karena data yang kurang akurat,
- Pemerintah daerah dapat mengisi gap ini dengan mendukung data yang lebih akurat.

Terima Kasih

